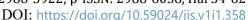
## Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS) Vol.1, No.1 Juni 2023

e-ISSN: 2988-5922; p-ISSN: 2988-6058, Hal 54-62









# Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mahasiswa Bekerja

## **Dian Widyantini** STIE Triguna Bogor

Alamat: Jl. Siliwangi No. 97 Bogor Korespondensi penulis: widyantini24@gmail.com

Abstract. This research aims to find out the influence of knowledge of tax regulations and ownership of NPWP on the awareness of paying taxes on working students. The population in this study is active students of Accounting and Management study program at STIE Triguna Bogor for the 2021/2022 academic year. The determination of samples using purposive sampling method with criteria have graduated or are studying taxation courses and already working and have NPWP. The sample obtained is 45 students. This research was conducted quantitative data and analyzed using multiple linear regressions. The results showed that partially, knowledge of tax regulations had no effect and was insignificant to the taxpayer's compliance of working students. Meanwhile, ownership of NPWP has a significant effect on the awareness of paying taxes on working students. Simultaneous test results show that knowledge of tax regulations and ownership of NPWP have a significant effect on the awareness of paying taxes on working students at STIE Triguna Bogor. From calculation, R³ value is 0,555. This indicates the dependent variable, taxpayer compliance can be explained by independent variables of 55,5%.

Keywords: knowledge of tax regulations; ownership of NPWP; taxpayer compliance

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dan kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak mahasiswa bekerja. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Akuntansi dan Manajemen di STIE Triguna Bogor yang aktif pada tahun akademik 2021/2022. Sampel ditentukan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria mahasiswa yang telah lulus atau sedang menempuh mata kuliah perpajakan serta telah bekerja dan memiliki NPWP. Sehingga sampel yang diperoleh adalah 45 orang mahasiswa. Penelitian dilakukan dengan data kuantitatif dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mahasiswa bekerja. Sedangkan kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mahasiswa bekerja. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan dan kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mahasiswa bekerja di STIE Triguna Bogor. Hasil penghitungan R² diperoleh nilai sebesar 0,555. Ini mengindikasikan bahwa variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 55,5%.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak; kepemilikan NPWP; pengetahuan peraturan perpajakan

## LATAR BELAKANG

Pajak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Hingga saat ini, pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pendapatan negara Indonesia. Lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari pajak. Dapat dilihat pada realisasi pendapatan negara tahun 2021 lalu yang mencapai Rp2.011,3 triliun yang berarti

mampu melampau dari target APBN tahun 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun. Pendapatan ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.547,8 triliun atau sekitar 76,96% dari realisasi pendapatan APBN tahun 2021, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp458,5 triliun atau sekitar 22,79% dari realisasi pendapatan APBN tahun 2021, dan hibah sebesar Rp5 triliun. Untuk itu tidaklah mengherankan bila pemerintah menerapkan berbagai strategi dan kebijakan di bidang perpajakan untuk dapat terus menstimulus peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, terutama pajak dalam negeri.

Terbitnya bermacam kebijakan perpajakan tersebut tentu saja harus dapat diikuti oleh wajib pajak tanpa kecuali. Penerapan self-assessment system di Indonesia menuntut wajib pajak untuk secara mandiri selalu siap dengan perubahan yang terjadi. Untuk itu diperlukan adanya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak di Indonesia. Pengetahuan mengenai peraturan tersebut dapat diperoleh dari lingkungan pendidikan formal seperti kampus atau pelatihan-pelatihan di bidang perpajakan, maupun pengetahuan yang diperoleh secara otodidak oleh masyarakat sebagai wajib pajak dengan mengakses melalui media lain seperti media internet yang saat ini mudah untuk dilakukan. Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan formal khususnya di bidang ekonomi, mata kuliah perpajakan menjadi salah satu sarana untuk membagikan pengetahuan dan perkembangan perpajakan. Perpajakan juga menjadi mata kuliah yang wajib ditempuh di fakultas ekonomi. Diharapkan dengan adanya mata kuliah ini akan dapat membantu pemahaman mahasiswa mengenai peraturan pajak yang berlaku di Indonesia sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaannya.

Pemahaman serta pengetahuan yang cukup mengenai kebijakan maupun peraturan perpajakan sangat dibutuhkan oleh wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya yang harus dipenuhi. Tanpa adanya dasar pengetahuan yang cukup, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam hal mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyetor pajak yang dilakukan secara mandiri. Tentunya ini akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak diakibatkan ketidakpahaman mereka mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

NPWP adalah nomor pokok wajib pajak yang wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun badan, yang telah memiliki penghasilan di Indonedia. Kementerian Keuangan mencatat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia telah meningkat hampir 20 kali lipat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Diketahui pada tahun 2002 terdaftar 2,59 juta wajib pajak dan bertambah menjadi 66,35 juta wajib pajak di tahun 2021. Rasio wajib pajak orang pribadi terhadap penduduk bekerja pun mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, rasio tersebut meningkat menjadi 34,6%. Kenaikan tersebut memperlihatkan bahwa wajib pajak orang pribadi masih berkontribusi cukup tinggi dalam penerimaan pajak negara. Meskipun demikian, dari data yang ada, diketahui bahwa rasio kepatuhan pelaporan SPT di Indonesia untuk tahun 2021 ternyata masih belum optimal hanya sekitar 84,07%.

Melihat data yang ada, meningkatnya angka kepemilikan NPWP oleh wajib pajak ternyata tidak serta merta meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya melalui SPT. Padahal kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong meningkatnya penerimaan pajak negara. Sebagai wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki penghasilan, maka sudah seharusnya mahasiswa bekerja tersebut memiliki NPWP sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan juga karena telah memiliki pengetahuan lebih di bidang perpajakan apabila dibandingkan dengan masyarakat umumnya, maka tentunya diharapkan tingkat kepatuhan pajak pada mahasiswa, khususnya pada mahasiswa bekerja akan lebih baik.

#### KAJIAN TEORITIS

### Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 menyebutkan,

"Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Soemitro dalam Hidayat & Purwana (2018), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan Mardiasmo (2011) mengemukakan bahwa pajak mempunyai dua fungsi yakni Budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan negara; dan Regulerend, pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### Pengetahuan

Secara umum pengetahuan dapat diartikan sebagai suatu informasi yang telah diketahui oleh seseorang dan akan ditelaah berdasarkan kecerdasan yang dimiliki. Dalam Damajanti (2015) disebutkan bahwa pengetahuan merupakan berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.

## Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

"Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya".

Melihat pengertian NPWP dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tersebut, dapat dilihat bahwa setiap wajib pajak harus memiliki NPWP apabila telah memperoleh penghasilan yang menjadi obyek pajak.

## Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

## Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak berkewajiban untuk melakukan administrasi perpajakan yang sesuai sesuai dengan peraturan. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan dari wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Rahayu (2010) juga menjelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- 1. Kepatuhan formal, yang merupakan suatu keadaan wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- 2. Kepatuhan material, yakni suatu keadaan wajib pajak secara substantif akan memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

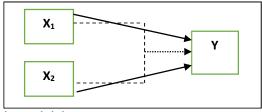
## Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait dengan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan Mahfud et al. (2017) memperlihatkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi yang ada di Kota Banda Aceh. Sedangkan secara parsial pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi, namun kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi yang ada di kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan Damajanti (2015) memperlihatkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan di kota Semarang. Selanjutnya Dama et al. (2019) dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Manado.

#### Model Konseptual dan Hipotesis Penelitian

Berikut adalah model konseptual yang digunakan dalam penelitian ini:



Hipotesis yang diajukan adalah:

- 1. Diduga pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mahasiswa bekerja di STIE Triguna Bogor.
- 2. Diduga kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mahasiswa bekerja di STIE Triguna Bogor.
- 3. Diduga pengetahuan peraturan perpajakan dan kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mahasiswa bekerja di STIE Triguna Bogor.

#### METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dengan jenis penelitian kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2015). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS versi 24. Analisis data akan melalui tahap uji instrumen yaitu uji validitas dan reliabilitas terhadap butir pertanyaan dalam kuesioner, uji asumsi klasik yang meliputi uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji normalitas. Selanjutnya adalah uji hipotesis dengan uji t serta uji F. Persamaan regresi berganda yang dikembangkan dalam penelitian ini dan digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

### Keterangan:

Y : Kepatuhan wajib pajak

a : Konstanta

b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub> : Koefisien regresi

X<sub>1</sub> : Pengetahuan peraturan perpajakan

X<sub>2</sub> : Kepemilikan NPWP

e : Error

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian menggunakan data primer. Populasi penelitian adalah mahasiswa STIE Triguna Bogor yang aktif pada tahun akademik 2021/2022. Sedangkan sampel penelitian didapat dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) Mahasiswa STIE Triguna Bogor yang telah lulus atau sedang menempuh mata kuliah Perpajakan; dan (2) Telah bekerja dan memiliki NPWP. Dengan kriteria yang ditetapkan tersebut, diperoleh sampel penelitian sebanyak 45 orang mahasiswa.

Berikut uji yang dilakukan dalam penelitian:

#### Uji Instrumen

## 1) Uji Validitas.

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang ada pada objek penelitian dengan daya yang dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2018). Uji validitas dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Jika nilai sig. < 0,05 dan bernilai positif, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Dari hasil uji validitas, diperoleh nilai sig. dari seluruh butir pertanyaan pada kuesioner adalah lebih kecil dari 0,05 (nilai sig. < 0,05). Dengan demikian seluruh butir pertanyaan memenuhi kriteria untuk dinyatakan valid.

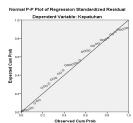
## 2) Uji Reliabilitas.

Menurut Sugiyono (2018) "Reliabilitas adalah derajat konsistensi atau keajegan data dalam interval waktu tertentu." Uji reliabilitas dengan menggunakan nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0,70. Jika uji reliabilitas > 0,70 maka butir pertanyaan kuesioner dinyatakan reliabel. Angka yang diperoleh untuk semua variabel menunjukkan angka di atas 0,70 yang berarti semua butir pertanyaan adalah reliabel.

## Uji Asumsi Klasik

## 1) Uji Normalitas.

Pada model regresi, uji normalitas dimanfaatkan untuk menguji nilai residual, apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan *Normal P-P Plot Regression Standardized Residual* untuk menguji normalitas data.

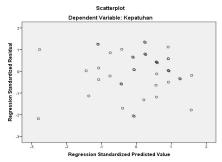


Gambar 2. Hasil uji normalitas

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan peraturan perpajakan  $(X_1)$  dan kepemilikan NPWP  $(X_2)$  terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) terdistribusi secara normal.

## 2) Uji Heterokedastisitas.

Uji heteroskedasitas menggunakan bantuan grafik scatterplot. Digunakan untuk menentukan ada tidaknya varians dari residual antara observasi satu dengan observasi yang lain.



Gambar 3. Hasil uji heterokedastisitas

Pada gambar 3 diperlihatkan hasil uji dengan menggunakan scatterplot, yaitu tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

## 3) Uji Multikolinieritas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah  $Variance\ Inflation\ Factor\ (VIF) > 10$  dan Tolerance < 0.1.

Tabel 1. Hasil uji multikolinieritas Coefficients<sup>a</sup>

		Collinearity Statistics		
Mo	odel	Tolerance VIF		
1	Pengetahuan	.681		1.469
	NPWP	.681		1.469

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Hasil di atas menunjukkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam persamaan regresi yang diajukan.

## Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur persentase pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat.

Tabel 2. Hasil penghitungan R<sup>2</sup>

			Model Summary <sup>b</sup>		
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.759*	.575	.555	1.85925	1.709

Nilai R<sup>2</sup> ditunjukkan pada tabel 2. Nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,555. Ini mengindikasikan bahwa variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas pengetahuan peraturan perpajakan (X<sub>1</sub>) dan kepemilikan NPWP (X<sub>2</sub>) sebesar 55,5%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 44,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

## Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian model regresi linier berganda akan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil penghitungan

			Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.482	2.943		2.882	.006
	Pengetahuan	.012	.091	.016	.134	.894
	NPWP	.699	.114	.749	6.148	.000

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat persamaan regresi linier berganda yang diperoleh:

$$Y = 8,482 + 0,012X_1 + 0,699X_2 + e$$

Melihat persamaan regresi yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa variabel X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> memiliki koefisien positif. Hal ini menandakan bahwa adanya variabel pengetahuan peraturan perpajakan dan kepemilikan NPWP akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## Uji t

Tabel 3 juga menunjukkan hasil uji t yang dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Terlihat bahwa nilai t hitung untuk variabel X<sub>1</sub> (Pengetahuan peraturan perpajakan) adalah sebesar 0,134 < 2,01669 (t tabel) yang berarti H<sub>0</sub> tidak ditolak. Dengan demikian, secara parsial pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mahasiswa bekerja.

Sedangkan nilai t hitung untuk variabel X<sub>2</sub> (Kepemilikan NPWP) adalah sebesar 6,148 > 2,01669 (t tabel) yang berarti H<sub>0</sub> ditolak. Dengan demikian, secara parsial kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mahasiswa bekerja.

## Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

Tabel 4. Tabel ANOVA

			ANOVA			
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	196.814	2	98.407	28.468	.000 <sup>b</sup>
	Residual	145.186	42	3.457		
	Total	342.000	44			

Pada tabel 4 dapat dilihat nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 28,468 > 3,22 (F tabel) dengan tingkat signifikansi 0,05. Ini mengartikan bahwa H<sub>0</sub> ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan, pengetahuan peraturan perpajakan dan kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mahasiswa bekerja.

#### Pembahasan

- 1) Secara parsial, pengetahuan peraturan perpajakan  $(X_1)$  tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
  - Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan bukanlah hal utama untuk dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak mahasiswa bekerja. Hal ini disebabkan karena wajib pajak telah mengetahui konsekuensi yang akan terjadi apabila tidak melakukan kewajiban perpajakan yang melekat pada wajib pajak.
- 2) Secara parsial, kepemilikan NPWP (X<sub>2</sub>) berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

  Kebarusan untuk memiliki NPWP bagi wajib pajak yang sudah memperoleh
  - Keharusan untuk memiliki NPWP bagi wajib pajak yang sudah memperoleh penghasilan di Indonesia ternyata dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Kepemilikan NPWP bersifat melekat pada diri wajib pajak dan tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain dalam hal pemenuhan kewajibannya.
- 3) Secara simultan, pengetahuan peraturan perpajakan (X<sub>1</sub>) dan Kepemilikan NPWP (X<sub>2</sub>) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
  - Bila dipadukan bersama, pengetahuan peraturan perpajakan dan kepemilikan NPWP memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan pengetahuan yang lebih baik terhadap peraturan serta kepemilikan NPWP sebagai hal yang melekat pada wajib pajak, maka kepatuhan pajak akan ikut meningkat karena wajib pajak mengetahui konsekuensi yang dihadapi apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- Secara parsial, pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mahasiswa bekerja di STIE Triguna Bogor.
- 2) Secara parsial, kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mahasiswa bekerja di STIE Triguna Bogor.

- 3) Secara simultan, pengetahuan peraturan perpajakan dan kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mahasiswa bekerja di STIE Triguna Bogor.
  - Saran yang dapat diajukan adalah:
- 1) Bagi pihak pemerintah, meningkatkan kembali strategi yang dapat menarik minat wajib pajak yang sudah memiliki NPWP agar mau mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya adalah dapat menambahkan variabel lain di luar variabel yang diteliti untuk melihat bagaimana pengaruh variabel lain terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### DAFTAR REFERENSI

- Dama, A., Saerang, D. P. E., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Indonesia Accounting Journal, 1(2), 57. https://doi.org/10.32400/iaj.26638
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 17(1), 12. https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.499
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2018). Perpajakan, Teori dan Praktek. PT. RajaGrafindo Persada.
- Kemenkeu (2022). https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id diakses tanggal 20 September 2022.
- Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 9, 6*(3), 1–9.

Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Andi.

- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Graha Ilmu. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta.
- . Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.